

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI RIAU**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Riau”



OLEH :

NITA WIDI YANTI

165110152

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jl. Khairuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NITA WIDI YANTI
NPM : 165110152
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan S1
PEMBIMBING : Hj.Nawarti Bustamam,SE.M.Si
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau

MENYETUJUI :

PEMBIMBING

(Hj.Nawarti Bustamam,SE.M.Si)

MENGETAHUI :

DEKAN

KETUA JURUSAN

(Dr. Firdaus AR. SE, M.Si, AK)

(Drs. M.Nur,MM)

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI RIAU

OLEH :

Nita Widi Yanti
NPM : 165110152

(dibawah bimbingan : Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si)

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh belanja daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Terhadap Provinsi Riau. Serta untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah di Provinsi Riau . analisis data menggunakan model regresi linear berganda data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2019 yang di ambil dari Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Provinsi Riau. hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019 sedangkan Belanja Langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Riau Tahun 2007-2019.

Kata kunci : Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, PAD

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL EXPENDITURE ON LOCAL REVENUE IN RIAU PROVINCE

By :

Nita Widi Yanti
NPM : 165110152

(Consultan: Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si)

This research aims to find out how the influence of regional spending (direct and indirect spending) on Riau Province. The data analysis uses the Multiple Linear Regression model, the data used are secondary data from 2007 to 2019 which were taken from the Ministry of Finance, Directorate General of Fiscal Balance, Riau Province. The results of the study show that Indirect Expenditures have a positive effect on Local Own Revenue in Riau Province in 2007-2019, while Direct Expenditures have a negative and significant effect on Local Own Income in Riau Province in 2007-2019.

Keywords: Indirect spending, Direct Spending, PAD

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Skripsi ini guna melengkapi salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis serta menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Khususnya Penulis Ucapkan Kepada Kedua Orang Tua dan Adik yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

2. Bapak Firdaus AR. SE, MSi, AK, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj. EllyanSastraningsih, M.Si, Selaku Wakil Dekan I FakultasEkonomiUniversitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. M.Nur,MM, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibu Hj.Nawarti Bustamam,SE.,M.Si,Selaku Dosen PembimbingSkripsiyang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakutas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu beserta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khususnya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan.
8. PenulisjugamengucapkanbanyakterimakasihkepadaBapak,Ibu manager dansemua Crew MarugameUdon Living World PekanbaruSelakuPimpinandan Team di tempatsayabekerja yang telahmemberidoronganandanmotivasi.
9. Orang yang banyak memberikan Motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis yaitu : Angelina Rivaldo Mirandas, Ayu Sri Wahyuni, Bayu Bahsara, Fifimardjuniserta teman-teman lainnya.

10. Seluruh teman-teman kelas A angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi dan memberikan semangat. Serta pihak-pihak lain yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dan doanya.

Akhir kata KepadaNya jualah Penulis menyerahkan diri semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis,

Nita WidiYanti



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidak stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi. Ketidakmampuan atau kelemahan sektor swasta melaksanakan fungsi entrepreneurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang di perlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.

Menurut Sukirno (2006:9) Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari perkembangan perekonomian dalam periode masa tertentu bila dibandingkan dengan masa sebelumnya dan perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:9) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa tersebut berkaitan dengan adanya efisiensi, alokasi biaya minimum dari keterbatasan sumber daya dan pertumbuhan dari sumber daya yang dioptimalkan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pemerintah diprovinsi Riau melaksanakan berbagai program pembangunan supaya lebih menggerakkan roda perekonomian di provinsi Riau. Tentu saja pemerataan pembangunan kesluruh wilayah dan lapisan masyarakat harus terus diperhatikan agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan harus terus diperhatikan agar terjadi pertumbuhan ekonomi.

Hambatan sosial utama adalah menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang mampu secara intensif menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah sosial, politis, dan ekonomi. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran

saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi, tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.

Pemerintah daerah mengalami perubahan setelah terjadinya otonomi daerah, yang di atur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk megatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuak dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi disebut daerah. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konskuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi pendapatan sehingga mampu meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, keuangan daerah adalah kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang,“Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran

masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

Menurut Priyo (2009:9), belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurnya jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal.

Menurut Abdul Halim (2014:228) belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa, Belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa.

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintahan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintahan daerah.

Semakin besar belanja daerah maka akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006

menegaskan, bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan struktur belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah dapat pula didefinisikan sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung.

Tabel 1.1 : Belanja Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2007-2019 (Rp)

Tahun	Belanja Tidak langsung (Rp)	Belanja Langsung(Rp)
2007	1.178.464.903.000	1.416.435.087.413
2008	1.544.222.000.000	2.814.286.000.000
2009	1.640.706.474742	2.116.774.369.487
2010	1.624.116.000.000	2.500.788.000.000
2011	2.303.070.714.304	1.962.058.946.000
2012	3.492.415.235.667	3.178.350.201.278
2013	3.292.872.527.400	4.232.409.978.641
2014	3.431.470.704.719	2.170.603.791.020
2015	1.003.206.737.083	408.349.431.956
2016	1.756.871.408.729	821.253.018.563
2017	1.715.731.432.232	623.751.838.487
2018	695.654.836.720	556.443.463.176
2019	2.121.156.574.214	798.227.476.788

Sumber : Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan,2019

Dari tabel 1.1 diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah total biaya belanja tidak langsung di Provinsi Riau pada Tahun 2019 sebesar Rp 2.121.156.574.214 lebih besar dari pada jumlah total belanja langsung pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 798.227.476.788 sedangkan belanja yang tertinggi terjadi pada Tahun 2012 dengan belanja tidak langsung sebesar Rp 3.492.415.235.667 untuk belanja tidak langsung yang terendah yaitu terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 695.654.836.720 sedangkan belanja langsung tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar Rp 4.232.409.978.641 dan belanja langsung terendah terjadi pada tahun pada tahun 2015 sebesar Rp 408.349.431.956.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019 (Rp)

Tahun	Pendapatan Daerah(Rp)	Pertambahan (Rp)	Pertambahan(%)
2007	1.257.064.416.520	-	-
2008	1.089.691.000.000	-167.473.416.520	-13,33
2009	1.352.412.744.499	262.821.744.449	24,12
2010	1.330.052.827.000	-22.359.917.449	-1.65
2011	2.210.130.782.734	880.077.955.734	66.16
2012	2.588.688.445.077	378.557.662.343	17,12
2013	2.725.623.913.109	136.935.468.032	5,28
2014	3.245.087.745.090	519.463.831.981	19,05
2015	3.476.960.097.649	231.872.352.559	7,14
2016	3.495.548.893.131	18.588.795.482	0,53
2017	3.753.800.000.000	258.251.106.869	7.388
2018	3.963.964.459.139	210.164.459.139	5,59
2019	3.609.065.922.067	-354.898.537.072	-8,95

Sumber : Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019 (olah data)

Dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau terbesar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 3.963.964.459.139 atau mengalami pertambahan sebesar Rp 210.164.459.139 atau 5.59%. sedangkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 1.089.691.000.000 dengan besarnya pertambahan Rp -167.473.416.520 atau -13,33 %.

Dengan dikelola APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fisik, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat didaerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah keinginan masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi seperti : sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian tenaga kerja dan skala produksi. Faktor non ekonomi seperti : sosial, manusia, politik, dan administratif.

Menurut Keynes pemerintah perlu berperan dalam perekonomian. Dari berbagai kebijakan yang dapat diambil Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah itu dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dalam meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh.(Deliarnov2003).

Yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah harus tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Sedangkan wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional.

Wagner menamakan hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*). (Jhingan, 2012; 275)

Pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor lain yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perencanaan anggaran dan belanja daerah pemerintah menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI RIAU”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

“Apakah ada Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau?”

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui berapa pengaruh rupiah belanja daerah terhadap pendapatan di Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah di Provinsi Riau dalam membuat kebijakan, terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian yang lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun bidang lain yang berhubungan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam proses perkuliahan di fakultas ekonomi Universitas Islam Riau.

1.5 Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar belakang berikut perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Pada bab ini akan di uraikan tinjauan pustaka yang merupakan teori pendukung dalam penulisan , kemudian dilanjutkan hipotesa.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian tentang lokasi penelitian, populasi dan penemuan sampel, jenis data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan secara umum lokasi penelitian, penjelasan ini berkaitan dengan tema penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi ringkasan dari hasil pembahasan, dan saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perkembangan Ekonomi

Pada umumnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat (Sukirno,2011:3).

Perkembangan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ketahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan kemakmuran masyarakat (Sukirno,2011 : 10).

Pada kenyatannya, proses pembangunan ekonomi tidak sederhana, namun pada saat pelaksanaannya sangat kompleks, karena bersifat multidimensi. Antara lain kompleksitas tersebut adalah pembangunan ekonomi tidak hanya melakukan bagaimana meningkatkan produktifitas melalui proses produksi yang secara klasik di

tentuka oleh faktor input seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dan bahan baku, tetapi juga menyangkut aspek tempat dimana aktifitas tersebut berlangsung, aspek sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat baik pada proses produksi maupun pada perilaku konsumsi. Untuk tujuan tersebut maka diperlukan perencanaan ekonomi yang bersifat komprehensif dan integratif antara pembangunan ekonomi pada satu sisi pembangunan sosial pada sisi yang lain.

Menurut Mankiw (2006) pada pembangunan ekonomi, ada tiga indikator makro yang dijadikan sebagai ukuran kemajuan pembangunan. Indikator tersebut adalah tingkat pertumbuhan (*growth rate*), tingkat penciptaan kesempatan kerja (*employment*) dan kestabilan harga (*price stability*). Teori Keynes menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor.

$$Y=C + I +G +NX$$

Dimana C adalah konsumsi, I adalah investasi , G adalah pengeluaran pemerintah dan NX adalah Neto Ekspor.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya(Sukimo Sadono,2007;9).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang(Boediono,1999;1)

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya(kuznets,2004:57)

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertumbuhan penduduk. Dengan pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output dan hasil.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP saja tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dan tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur atau tidak.

Pendapatan nasional merupakan salah satu alat ukur penilaian kinerja kegiatan perekonomian suatu negara. Salah satu komponen penting yang dibutuhkan dalam menentukan pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam menentukan pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu periode tertentu sekaligus dengan nilainya.

Dalam menghitung besarnya pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Menghitung besarnya pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa berbagai unit produksi disuatu negara dalam jangka waktu tertentu.

2. Pendekatan Pendapatan

Merupakan jumlah balas jasa yang di terima oleh faktor-faktor produksi yaitu ikut serta dalam proses produksi disuatu negara dalam jangka waktu tertentu.

3. Pendekatan Pengeluaran

Diperoleh dari penjumlahan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (*final demand*) atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian pada harga yang berlaku. Komponen pendapatan nasional dengan pendekatan metode pengeluaran adalah sebagai berikut , pengeluaran konsumen rumah tangga (C), pengeluaran investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G), serta ekspor netto (X-M)

Pakar pertama yang lebih serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi adalah Schumpeter. Schumpeter telah meletakkan dasar perkembangan ekonomii dalam tulisannya *The Theory Of Economic Development*. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan-penemuan baru (Deliarnov,2010;186)

Teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi :

1. Teori –teori klasik

Beberapa teori klasik yaitu :

- a. Menurut Teori Adam Smith (1776) ada dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1) Pertumbuhan output (GDP) total

Sistem produksi atau negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu : (1) sumber-sumber alam yang tersedia (atau faktor produksi tanah), (2) sumber-sumber manusiawi (atau jumlah penduduk) dan (3) stok barang kapital yang sah. Menurut Smith, sumber alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat.

Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang memegang peranan dalam proses produksi adalah dua unsur produksi yang lain yaitu jumlah penduduk dan stok kapital yang ada. Kedua unsur lain ini lah yang menentukan besarnya output masyarakat dari tahun-ketahun.

Dalam proses pertumbuhan output unsur sumber-sumber manusiawi atau jumlah penduduk mempunyai peranan yang pasif, artinya bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut. Dalam unsur produksi yang ketiga, yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan tingkat output. Smith memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Apa yang terjadi dengan tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital, dan laju pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Tentu saja sampai tahap pertumbuhan dimana sumber-sumber alam mulai membatasi. (Boediono, 1997:7-9).

2) Pertumbuhan penduduk

Disebutkan diatas bahwa penduduk bersifat pasif dalam proses pertumbuhan output, dalam arti bahwa, dalam jangka panjang berapapun jumlah nya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh proses produksi akan tersedia melalui pertumbuhan penduduk. menurut Smith, penduduk meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari pada tingkat upah *subsistensi*, maka orang-orang akan kawin pada umur lebih muda, kematian anak-anak berkurang dan jumlah kelahiran akan bertambah. Sebaliknya jumlah penduduk akan berkurang apabila tingkat upah yang berlaku dibawah tingkat upah *subsistensi*. (Boediono, 1993; 13)

- b) Menurut Teori David Ricardo Perekonomian ditandai oleh sebagai berikut:
- 1) Tanah terbatas jumlahnya
 - 2) Tenaga kerja (penduduk) yang meningkat (atau menurun sesuai dengan upah minimal) yang disebut oleh ricardo upah alamiah (*natural wage*)
 - 3) Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada diatas tingkat keuntungan minimal yang di perlukan untuk menarik mereka melalui investasi
 - 4) Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi
 - 5) Sektor pertanian dominan

Dengan terbatasnya tanah maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menghasilkan produk marginal (*marginal product*) yang semakin menurun, karena

hukum produk marginal yang semakin menurun atau lebih terkenal dengan nama *the law of diminishing return*. Selama buruh yang bekerja pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah diatas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja, dan selanjutnya menekan kebawah tingkat upah.

Proses ini akan berhenti apabila tingkat upah turun dibawah tingkat upah alamiah. Misalnya apabila tingkat upah turun dibawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Dan tingkat upah akan naik kembali pada tingkat upah alamiah, pada posisi ini jumlah penduduk konstan. Jadi dari segi faktor produksi tanah dan faktor produksi tenaga kerja, ada satu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing return*.

Akumulasi kapital dan kemajuan teknologi ini cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya bisa memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* sehingga memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Akumulasi kapital memang bisa memperlambat penurunan produktivitas tenaga kerja. Akumulasi kapital hanya akan dilakukan orang apabila kapital menerima imbalan (keuntungan) yang cukup.

c) Menurut Teori Arthur Lewis (1964) Model lewis terkenal dengan nama model pertumbuhan dengan suplai tenaga kerja yang tak terbatas. Pokok permasalahan yang dikaji oleh lewis adalah bagaimana proses proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dengan dua sector yaitu Sektor tradisional, dengan

produktivitas rendah dan sumber tenaga kerja yang melimpah. Sektor modern, dengan produktivitas tinggi dan sebagai sumber akumulasi kapital.

2. Teori-teori modern

Beberapa teori modern yaitu :

- a) Teori pertumbuhan Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan, dan kedua ia, memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama dapat disebut sebagai dampak permintaan dan yang kedua disebut dampak penawaran investasi. karena itu, selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar.

Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat *ekuilibrium* pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata ataupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat.

Hal ini memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan menggeser perekonomian keluar jalur *equilibrium* pertumbuhan mantap.

Jadi apabila pekerjaan hendak di pertahankan dalam jangka panjang, maka investasi harus senantiasa di perbesar. Ini lebih lanjut memerlukan pertumbuhan

pendapatan nyata secara terus-menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas stok modal yang sedang tumbuh. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperlukan ini dapat disebut sebagai tingkat pertumbuhan terjamin (*warranted rate of growth*) atau tingkat pertumbuhan kapasitas penuh. (Jhingan,2012;229-230).

- b) Teori Pertumbuhan Solow membangun modelnya disekitae asumsi berikut:
1. Ada satu komoditi gabungan yang di produksi.
 2. Yang dimaksud output ialah output *netto*, yaitu sesudah dikurangi biaya penyusutan modal.
 3. *Return to scale* bersifat konstan. Dengan kata lain, fungsi produksi adalah homogan pada derajat pertama.
 4. Dua fator produksi buruh dan modal, dibayar sesuai dengan produktivitas fisik marginal mereka.
 5. Harga dan upah fleksibel.
 6. Buruh terpekerjaan secara penuh.
 7. Stok modal yang ada juga di pekerjakan secara penuh.
 8. Buruh dan modal dapat di subsitusikan satu sama lain.
 9. Kemajuan teknik bersifat netral.

Dengan asumsi tersebut, Solow menunjukkan dalam model nya bahwa koefisien teknik yang bersifat variabel, rasio modal-buruh akan cenerung menyesuaikan dirinya, dalam perjalanan waktu, kearah rasio keseimbangan. Jika

rasio sebelumnya antara modal dan output akan tumbuh lebih lambat daripada tenaga buruh, dan sebaliknya. Analisa Solow berakhir pada jalur keseimbangan (keadaan mantap) yang berangkat dari sembarang rasio modal-buruh.

2.1.1.1 Ciri-Ciri Pertumbuhan

Prof. Simon Kuznets menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja. (Jhingana, M.L., 2012; 57)

1) Laju Pertumbuhan Penduduk dan Produk Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi modern, sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak abad ke-18 atau abad ke-19, ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi di barengi laju pertumbuhan yang cepat. Laju kenaikan yang luar biasa itu paling sedikit sebesar lima kali untuk penduduk dan paling sedikit sepuluh kali produksi. Laju yang tinggi di dalam pertumbuhan produk per kapita dan penduduk tidak secara langsung menggambarkan laju yang tinggi dalam kenaikan total.

2) Peningkatan Produktivitas

Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkat lajunya produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau semakin

meningkatnya efisiensi, atau kedua-duanya. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang lebihh besar untuk setiap unit.

3) Laju Pertumbuhan Struktural yang Tinggi

Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan darikegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh. Pergeseran intersektoral ini dibarengi dengan pertumbuhan dalam skala perusahaan, dan terjadinya perubahan bentuk organisasi dalam sektor seperti manufak turing atau perdagangan, yaitu dari perusahaan kecil tidak berbadan hukum menjadi unit badan usaha yang besar dengan struktur industri dan teknolpogi yang berubah cepat.

4) Urbanisasi

Pertumbuhan ekonomi Modern ditandai pula dengan semakin banyak nya penduduk di negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi pada umumnya merupakan produk indutrialisasi. Skala ekonomi yang timbul dalam usaha non agragis sebagai hasil perubahan teknologi menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke daerah perkotaan.

5) Ekspansi Negara Maju

Ekspansi negara-negara maju bermula dari bangsa-bangsa Eropa tidak lain adalah akibat dari revolusi teknologi dibidang tranportasi dan komunikasi. Unsur politik atau kekuatan dalam hubungan internasional merupakan faktor penting dalam

penyebaran pertumbuhan ekonomi modern. Ini berarti saling ketergantungan semakin meningkat antara bangsa, baik karena semakin kuatnya potensi untuk saling berhubunga satu sama lain atau pun karena mereka secara bersama-sama mempergunakan ilmu pengetahuan dan bersifat transnasional. Ketergantungan seperti ini mengakibatkan pendidikan modern di negara maju menjadi merata sehingga memperbesar kemampuan mereka untuk memanfaatkan dan menyumbang pada ilmu pengetahuan yang ada.

Tetapi pertumbuhan ekonomi modern tidak berhasil menyebar ke negara terbelakang karena dua faktor. Pertama, mereka tidak mempunyai kerangka sosial dan politik yang stabil dan fleksibel, yang dapat menampung perubahan struktural yang cepat dan mendorong kelompok pendukung pertumbuhan di dalam masyarakat. Kedua, kebijaksanaan yang dianut negara maju membatasi kebebasan politik dan ekonomi negara kurang berkembang. Sebagagai akibatnya negara kurang berkembang gagal memetik keuntungan dari penyebaran pertumbuhan ekonomi modern tersebut.

6) Arus barang, Modal, dan Antar bangsa

Faktor yang menyebabkan migrasi internasional ini dalam migrasi antar benua, adalah mudahnya angkutan antar benua melauai kapal laut atau melalui kereta api, arus barang perdagangan komoditi sebegitu jauh merupakan unsur paling dominan dari ekspansi-keluar dari negara-negara maju. Ada dua kecenderungan yang kita lihat dalam hal ini. Pertama, laju pertumbuhan niaga (dunia) yang tinggi antra tahun-tahun 1820-an dan 1913. Kedua, peranan beberapa negara maju dalam

perdagangan dunia antara tahun-tahun 1829-an dan 1913 yang begitu tinggi. Arus internasional investasi modal asing berkembang dengan cepat sejak kedua abad ke-19 sampai PD I. sebagian besar modal mengalir ke negara maju, karena mereka lebih mengutamakan pertimbangan politik daripada ekonomi.

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi seperti :

1) Faktor Ekonomi

a) Sumber Alam

Sumber alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan suatu hal yang penting bagi satu negara atau daerah untuk pertumbuhan ekonominya. Apabila suatu negara atau daerah kekurangan sumber daya alam tidak akan dapat membangun dengan cepat atau pertumbuhan ekonominya akan lambat akan tetapi tersedianya sumber daya alam secara melimpah tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi, melainkan yang diperlukan adalah bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam secara benar dan tepat.

b) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu akan disebut akumulasi modal

atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal akan menaikkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya menaikkan produksi tetapi juga dapat menaikkan kesempatan kerja. Pembentukan modal dapat pula membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar untuk kemajuan ekonomi.

c) Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, yang bersifat komplemen bagi modal, buruh dan membantu menaikkan produktifitas. Dalam pertumbuhan ekonomi modern peranan wiraswasta sangat penting, wiraswasta tampil sebagai organisator sekaligus orang yang berani mengambil resiko diantar ketidakpastian. Di negara sedang berkembang peranan pemerintahan sangat besar dalam penyediaan overhead sosial. Perusahaan yang pada umumnya dikelola pemerintah seperti perusahaan umum yang mencakup pertambangan, perkebuan, perdagangan, penyaluran, bahan mentah, dan kebutuhan pokok, produksi barang modal dan sebagainya.

d) Kemajuan Teknologi

Dalam proses pertumbuhan ekonomi sangat penting di dukung oleh kemajuan teknologi. Proses yang dimaksud adalah berkaitan dengan perubahan yang meliputi metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil penelitian baru. Pertumbuhan teknologi dapat meningkatkan produktifitas buruh, modal dan faktor

produksi lain untuk negara sedang berkembang yang dapat memetik sumber ilmu pengetahuan baru dari negara maju

e) Pemabagian Kerja dan Skala produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktifitas. Kedua hal tersebut akan dapat menggiring perekonomian kearah ekonomi produksi dengan skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industri. Seperti kita ketahui perekonomian industri akan cepat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, spesialisasi dapat meningkatkan produktifitas buruh yang dapat memacu kenaikan pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga di pengaruhi oleh luas pasar. Luas pasar akan meningkat akibat dari perekonomian yang meningkat hal tersebut dapat terjadi melalui besar kecilnya tingkat permintaan, banyak tidaknya tingkat produksi, tersedia atau memadai sarana transportasi dan sebagainya. Jika skala produksi besar atau luas maka pembagian kerja spesialisasi juga akan semakin luas. Dengan demikian output akan dapat ditingatkan dan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

3. Faktor Non Ekonomi

Selain faktor-faktor ekonomi yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor non ekonomi. kedua faktor tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor non ekonomi tersebut yaitu: faktor sosial, faktor manusia dan faktor politik.

1) Faktor sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan. Pendidikan dan kebudayaan barat membawa ke arah penalaran (*reasoning*) dan skeptisisme. Ia menanamkan semangat kembara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial.

Orang biasanya menabung dan berinvestasi, dan menikmati resiko untuk memperoleh laba. Mereka mengembangkan apa yang oleh Lewis disebut hasrat untuk berhemat dalam rangka memaksimalkan output berdasarkan input tertentu.

2) Faktor manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumberdaya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Peningkatan GNP per kapita yang begitu hebat rupanya berkaitan erat dengan pengembangan faktor manusia sebagaimana terlihat dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak di kalangan tenaga buru. Para ahli modern disebut pembentukan insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk negara bersangkutan. Proses ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial pada umumnya.

Penggunaan secara tepat sumberdaya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukn dengan cara berikut. Pertama, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. Sumberdaya manusia dapat di manfaatkan dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan di turunkan yaitu dengan cara

keluarga berencana dan penelitian atas penduduk untuk menurunkan angka kelahiran. Kedua, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh. Untuk meningkatkan produktivitas dan mobilisasi buruh, pandangan masyarakat harus diubah agar mereka bersedia menerima arti penting dan martabat buruh. Hal ini memerlukan penyebaran pendidikan. Hanya tenaga buruh yang terlatih dan terdidik dengan efisiensi tinggi yang akan membawa masyarakat kepada pembangunan ekonomi yang pesat.

3) Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi. Prof Lewis dengan tepat melihat tindakan pemerintah memainkan peranan penting di dalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi. Pemerintah harus memberikan kepada masyarakat jasa-jasa yang diperlukan untuk merangsang perekonomian seperti: ketertiban, keadilan, keamanan dan pertahanan, imbalan yang sepadan dengan kemampuan dan penerapan produksi, jaminan dalam menikmati harta kekayaan, hak-hak akan warisan, jaminan bahwa kesepakatan dan perjanjian di dalam bisnis akan dipegang teguh, pengaturan standar takaran, ukuran dan mata uang, serta kesetabilan sistem

pemerintah itu sendiri untuk memelihara rasa ketertiban dan kepastian akan harapan dan pekerjaan yang akan diraih dimasa depan. (Jhiangan,,M.L,2017;76)

1.1.3 Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan antar pemerinah (*intergovernmental fiscal relations*) meunjuk pada hubungan keuangan anat berbagai tingkatan pemerintahan dalam suatu negara dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan negara dan pola pengeluaranya termasuk kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih terhadap tingkat pemerintahan yang lebih renddah.(Suparmoko,M,2003;308)

Secara umum, hubungan antara pusat dan daerah mencakup tiga aspek, yaitu hubungna kewenangan, hubungan keuangan dan hubungan pengawasan.UU No 32/2004 disahkan untukmengganti UU No. 22/1999. Misi utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dasar dan mengembangkan sektor unggulan secara demokratis. Bagian urusan pemerintahan dilaksanakan masing-masing tingkatan pemerintahan berdersarkan kriteria :

1. Pusat : berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monev, supervisi, fasilitas, dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
2. Provinsi : berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal dalam satukab/kota).

UU No.32 tahun 2004 ini juga membagi urusan pemerintahan menjadi 2, urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang harus ada

berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urusan wajib ada 26, sedangkan urusan pilihan ada 8 urusan. Bila dilihat dari penyerahan urusan pusat ke daerah, kerangka UU no 32/2004 ini tidak memenuhi aspek edukasi, karena semua daerah dipukul rata dengan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Padahal kemampuan tiap daerah berbeda-beda dan perlu pembelajaran secara gradual.

Pola hubungan keuangan antar pemerintahan, pada gilirannya merupakan pencerminan ideologi politik dan struktur pemerintahan negara. Derajat sentralisasi keuangan negara dalam suatu negara, pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel seperti proporsi penerimaan penerimaan total dan persentase dari pengeluaran pemerintahan pusat terhadap pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. (Suparmoko, 2003; 309)

2.1.3.1 Keuangan Daerah

Dalam perencanaan anggaran dan belanja negara, menganut prinsip anggaran beimbangan dan dinamis. (BPS; 353). Dengan pembagian daerah, maka mau tidak mau dituntut adanya suatu sistem keuangan negara yang akan dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam hal pemerintah harus menyediakan jasa-jasa publik, maupun dalam hal negara harus mengumpulkan dan lewat berbagai sumber.

Mengenai penyediaan barang-barang dan jasa-jasa sosial/publik perlu dipertanyakan apakah harus disediakan oleh pemerintah pusat (sentralisasi) ataukah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing (desentralisasi). Beberapa barang publik memiliki manfaat yang sangat luas bahkan bersifat nasional (seperti pertahanan nasional, penelitian tenaga nuklir, pemasangan satelit pelapa, dan sebagainya). Sehingga kelompok penerima manfaat juga terbatas pada penduduk disuatu daerah yang terbatas. Jasa publik ini seharusnya diusahakan secara desentralisasi dan biayanya ditanggung oleh penduduk daerah bersangkutan.

2.1.3.2 Belanja Daerah

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelajaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak terelakkan pemerintah (Sukimo,2004).

Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Agar terwujud sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayaan maka pemerintah menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Untuk tingkat daerah dinamakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-undang (UU) No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan

Daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam negeri (pemedagri) Nomor 59 Tahun 2007 dan yang terbaru adalah Pemedagri Nomor 21 Tahun 2011. Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditarik pengertian mengenai belanja daerah yaitu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.(Halim Abdul,2014;227)

Belanja daerah menurut Halim (2002) adalah semua pengeluaran pemerinthan daerah pada suatu periode anggaran.(Halim Abdul,2014;227). Berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya yang masing-masing secara tegas harus dicantumkan bersamaan dengan jumlah anggarannya dan realisasi anggaran periode sebelumnya.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan(UU Nomor 32 Tahun 2004). Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintahan desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal (Abdul Halim,2014;228).

Dalam Peraturan Pemerintahan No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset

tetapan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Sedangkan dalam peraturan menteri dalam Negeri No. 21 tahun 2011 belanja modal didefinisikan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan SKPD. (Halim 2014; 228) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayar bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 3) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan

keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

- 4) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- 5) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- 6) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah

daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diserahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

- 8) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. (Halim Abdul, 2014; 228). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana

mobilitas, sewa alat berat,sewa perlengkapan dan perlatan kantor, makanan dan minuman, pakaiana dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai

- 3) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakuaana dalma rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jalan,irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium pankitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

2.1.3.3 Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman(2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. *Income* tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *Local Government Revenue*.

Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan PAD ini berasal dari beberapa sumber.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah akan mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pasal 157, yaitu : pajak daerah, pajak hotel, pajak restaurant dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame. Sumber kedua untuk PAD berasal dari retribusi daerah.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Bagian terakhir dari PAD adalah pengaruh yang ditimbulkannya. Terutama dari pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika sebuah kebijakan untuk membeli barang dan jasa telah ditetapkan oleh pemerintah, pengeluaran pemerintah mengindikasikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penulis dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari peneliti.

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Masayu Rahmawati (2015)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah dikota Bandung	Berdasarkan hasil koefisien korelasi dana perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

2	M.Rimba Subanda Lubis (2009)	Analisis Pengaruh PAD dan Dana Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertambahan Ekonomi Daerah di Kota Padang Sidempuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan PAD $0.003 < \alpha < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai signifikan pada pengeluaran pembangunan $0.018 < 0.05$ maka H_0 dan H_a diterima.
3	Ni Putu gina Sukma Antari (2018)	Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan keuangan secara langsung.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau dengan tahun terbaru yaitu dari tahun 2007-2019.

2.3 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori diatas maka di buat suatu hipotesa dari penelitian ini yaitu, “Diduga ada pengaruh belanja daerah terhadap pendapatan daerah di Provinsi Riau”.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan diantaranya adalah sebagai berikut : lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis.

3.2 Jenis Penelitian dan sumber data

Data yang digunakan untuk peneliti ini adalah data panel belanja daerah dan pendapatan daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019, yaitu data panel tersebut berupa data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui website : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> berupa data Sekunder APBD di Provinsi Riau.

3.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan dan dilakukan dengan Teknik Dokumentasi, Teknik Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen tertulis, Gambar maupun elektrik khususnya berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisi Data

Penggunaan analisis Kuantitatif dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa rumus statistic diantaranya sebagai berikut :

a. Analisis Regresi

Pada penelitian ini metode analisis yang dipakai yaitu model analisis inferensial, merupakan analisis berganda untuk mengetahui pengaruh belanja daerah dan pendapatan asli daerah di Provinsi Riau yang dapat dinyatakan pada bentuk fungsi dibawah ini :

$$Y = f(X_1, X_2)$$

Formulasi dalam persamaan regresi berganda

yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Pendapatan asli daerah (Rp)

β_0 = Konstanta

β_0, β_2 = Parameter

X_1 = Belanja Tidak Langsung (Rp)

X_2 = Belanja Langsung (Rp)

ϵ = error

Secara ekonometrika model yang dinilai baik bila memenuhi semua kondisi ideal suatu model. Secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan sebuah situasi yang menunjukkan adanya koleras atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah

model regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari value inflation factor (VIF) apabila nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas begitu pula sebaliknya jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai *disturbance* tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Uji ini merupakan asumsi dimana dalam regresi variable terikat tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa nilai dari variableterikat tidak berhubungan dengan nilai variable itu sendiri baik nilai sebelumnya maupun nilai periode nilai sesudahnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan memihak angka DW apabila :

1. Angka DW dibawah -2 berarti ada korelasi positif.
2. Angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negative.

c. Uji Normalitas

Uji ini adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data, penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistic parametric, asumsi yang harus dimiliki

oleh data adalah data tersebut harus berdistribusi secara normal, maka data terdistribusi secara normal yaitu bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan regresi. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variable terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID yang tergambar dalam scatterplot dengan keputusan :

1. jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
2. jika ada pola yang jelas secara titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5 Uji F Statistik

Pada hasil uji F dapat ditunjukkan proporsi variabel dalam independen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama dapat dilakukan dengan menggunakan uji analisis (uji F). Tujuannya adalah untuk menguji variabel independen manakah yang paling signifikan berpengaruh terhadap variable dependen.

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yang perlu dilakukan pengujian koefisien regresinya secara serentak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *eviews 9.0*.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk uji F maka langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

Jika $F_{\text{prob}} > \alpha 0.05$ maka H_0 diterima

Jika $F_{\text{prob}} < \alpha 0.05$ maka H_0 ditolak

3.6 Uji T Statistik

Uji t atau uji parsial dalam penelitian ini untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara masing-masing terhadap variabel terikatnya. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H_a : artinya secara parsial variabel independen ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_0 : artinya secara parsial variabel independen tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Jika $t_{\text{prob}} > \alpha 0.05$ maka H_0 diterima

Jika $t_{\text{prob}} < \alpha 0.05$ maka H_0 ditolak

Jika nilai T_{prob} maka hipotesis H_a ditolak

Atau

Jika nilai $T_{\text{prob}} > \alpha 5\%$ maka hipotesis H_a diterima

Jika nilai $T_{\text{prob}} < \alpha 5\%$ maka hipotesis H_a ditolak

3.7 Analisis Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan merujuk kepada kemampuan dari variable independen (X) dalam menerangkan variable dependen (Y). koefisien determinan bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable terikat. Dalam penelitian ini perhitungan koefisien determinan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variable bebas (belanja langsung dan tidak langsung) dalam menjelaskan variable terikat (pendapatan asli daerah). Nilai R^2 berkisaran 0-1.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis Provinsi Riau

4.1.1 Keadaan Alam

Provinsi Riau memiliki Luas wilayah $87^{\circ}023'66''$ atau 8.915.015.09 ha. Terletak pada posisi $02^{\circ}25'00''$ Lintang Utara atau antara 01015° dan $100^{\circ}03'-104^{\circ}00''$ Bujur Timur. Wilayah Provinsi Riau ini cukup luas dan berada di bagian tengah pulau Sumatra. Provinsi Riau Berbatasan Langsung dengan Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka di sebelah Utara,

Menurut kondisi geomorfologi daratan riau dapat dibedakan menjadi wilayah bagian timur yang di dominasi oleh daratan rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter d.p.i dan bagian tengah merupakan bagian daratan bergelombang serta barat yang merupakan daratan berbukit dibentuk oleh gugusan barisan, kondisi geomorfologi tersebut menempatkan wilayah riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari 15 sungai yang mengalir diprovinsi riau yang bermuara di pantai timur.

Batas –batas Riau adalah :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatra Utara
- Sebelah selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Barat

- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Sumatra Utara

Sedangkan batas – batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau adalah :

1. Kabupaten Kuantan Singingi

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan : Provinsi Sumatra Jambi
- Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

2. Kabupaten Indragiri Hulu

- Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
- Sebelah selatan : Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur : Provinsi Indragiri Hulu

3. Kabupaten Indragiri Hilir

- Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

4. Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis

- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

5. Kabupaten Siak

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti

6. Kabupaten Kampar

- Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

7. Kabupaten Rokan Hulu

- Sebelah Utara : Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

8. Kabupaten Bengkalis

- Sebelah Utara : Selat Malaka

- Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

9. Kabupaten Rokan Hilir

- Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah barat : Provinsi Sumatra Utara
- Sebelah Timur : Kota Dumai

10. Kabupaten Kepulauan Meranti

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
- Sebelah Barat : Kabupaten Siak
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

11. Kota Pekanbaru

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan

12. Kota Dumai

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis

- Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir
- Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis

Provinsi Riau memiliki 4 sungai besar yaitu diantaranya berperan penting sebagai prasarana perhubungan yakni, sungai siak dengan panjang (300 km) dan kedalaman 8-12 meter, sungai rokan dengan panjang (400 km) dan kedalaman lebih kurang 6-8 meter, sungai kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 meter, dan Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 meter. Keempat sungai yang membelah diri dari penguungan daratan tinggi bukit barisan bermuara di selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi oleh pasang surut laut.

Tabel 4.1 : Nama kabupaten/Kota dan Luas Wilayah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	5.259,36	6,04
2	Indragiri Hulu	Rengat	7.723,36	8,88
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	12,614,78	14,50
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12.758,45	14,66
5	Siak	Siak Sri Indrapura	8.275,18	9,51
6	Kampar	Bangkinang	10.983,47	12,62
7	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	7.588,13	8,72
8	Bengkalis	Bengkalis	6.975,41	8,02
9	Rokan Hilir	Bangan Siapi-api	8.881,59	10,21
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	3.707,84	4,26
11	Pekanbaru	Pekanbaru	632,27	0,73
12	Dumai	Dumai	1.623,38	1,87
Provinsi Riau		Riau	87.023,66	100,0

Sumber : Bps 2019

Dari luas daerah 8,9 juta Ha sebagian besar jenis tanahnya adalah histosols organik yaitu 3,8 juta Ha lebih (43,35 persen) diikuti oleh jenis tanah ultisols 2,6 juta Ha lebih (29,51 persen).

4.2 Sejarah Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau telah memerlukan waktu paling kurang 6 tahun, yaitu dari tahun 1952 sampai 1958. Usaha pembentukan Provinsi ini melepaskan diri dari provinsi Sumatra Tengah (yang meliputi Sumatra Barat , Jambi dan Riau) dilakukan di tingkat DPR pusat oleh Ma'rifat Marjani, dengan dukungan penuh dari seluruh penduduk Riau.

Pembentukan Provinsi ini telah ditetapkan dengan undang-undang darurat No 19/1957 yang kemudian diundangkan dengan undang-undang No 61 tahun 1958. Provinsi Riau ini merupakan gabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di rantau ini, di antaranya ialah kerajaan Indragiri (1658-1838), kerajaan Siak (1723-1858), kerajaan Pelalawan (1530-1879), kerajaan kevil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis (Rantau Kuantan).

Dalam sejarahnya, daerah Riau pernah menjadi penghasil berbagai hasil bumi dan barang lainnya. Pulau Bintan pernah dijuluki sebagai pulau segantang lada, karena banyak menghasilkan lada. Daerah Pulau Tujuh, terutama pulau Midai pernah menjadi penghasil kopra terbesar di Asia Tenggara, paling kurang sejak tahun 1906 sampai tahun 1950-an.

Provinsi Riau memiliki 15 sungai, diantaranya adalah 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan, seperti sungai Siak (300Km), Sungai Rokan (400 Km), Sungai Indragiri (500Km). Ke-4 sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan. Sungai-sungai tersebut bermuara di Selat Malaka serta Laut Cina Selatan.

Saat ini Provinsi Riau terdapat 12 Kabupaten dan Kota, yakni Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi. Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.3 Visi dan Misi Provinsi Riau

Untuk menjelaskan tujuan yang ingin dicapai Provinsi Riau memiliki visi yaitu *“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”*. Agar dapat tercapainya visi yang sudah ditetapkan maka Misi atau garis besar jalan yang diambil oleh Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkemampuan, profesional, bermoral, serta keteladanan pemimpin dan aparat, melalui penguatan kelembagaan, kualitas aparat dengan system recruitment profesional, penguatan Balitbang, penggunaan ICT, penguatan good governance, dan peningkatan kualitas public.

2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penekanan pada kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan sarana dan prasarana masyarakat beragama, seni budaya dan moral (human resources development).
3. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan terutama program Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan Kebodohan dan Pembangunan Infrastruktur.
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur (spread of development equilibrium between region and society).
5. Mewujudkan prekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan mereka dengan UMKM, Koperasi, serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor (empowerment of society base economy).
6. Mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudian akses modal, akses sarana dan sarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran.
7. Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan rasa aman dengan kepastian hukum, percepatan pelayanan izin usaha

penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar, promosi dan media serta mitra usaha dagang.

8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdalam mengatasi berbagai permasalahan social dan ekonomi masyarakat perdesaan (empowerment of social and rural institution)
9. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (strengthening of mal ay culture).
10. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah melalui pembangunan database penduduk Riau, di gitasi Nomor Penduduk Riau dengan kartu digital.
11. Mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan , perdesaan dan pemukiman terpadu.
12. Mewujudkan penanganan berbagai dampak dari issue pemanasan global “global warming”, kenaikan harga BBM dan rawan pangan melalui penanganan berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka panjang.

4.4 Kondisi Demografis Provinsi Riau

Provinsi Riau salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat , pastinya akan menimbulkan pertumbuhan penduduk yang juga pesat pula. Berikut data pertumbuhan penduduk di provinsi Riau Kabupaten/Kota.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kuantan Singingi	324.413
2	Indragiri Hulu	433.934
3	Indragiri Hilir	731.396
4	Pelawan	460.780
5	Siak	477.670
6	Kampar	851.837
7	Rokan Hulu	666.410
8	Rokan Hilir	566.228
9	Bengkalis	697.218
10	Kepulauan Meranti	184.372
11	Pekanbaru	1.117.359
12	Dumai	303.292
	Provinsi Riau	681.409

Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (BPS),2019

Dari Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak yaitu terletak di Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 303.292 Jiwa.

4.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tentunya menjadikan suatu daerah harus mampu meningkatkan PDRB daerahnya yaitu dengan sejumlah pertumbuhan penduduk tentunya pertumbuhan PDRB harus pesat ketimbang pertumbuhan penduduk. Dengan seperti itu kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga diharapkan selalu meningkatkan.

Tabel 4.3 Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Tahun 2018.

No	Kabupaten /Kota	Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Kuantan Singingi	4,65
2	Indragiri Hulu	3,47
3	Indragiri Hilir	3,59
4	Pelalawan	3,75
5	Siak	1,09
6	Kampar	1,90
7	Rokan Hulu	4,17
8	Rokan Hilir	-1,62
9	Bengkalis	-0,12
10	Kepulauan meranti	4,01
11	Pekanbaru	5,39
12	Dumai	5,21
	Provinsi Riau	2,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (Bps)2019.

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi terdapat di kota Pekanbaru dengan persentase 5,39%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi yang paling rendah terdapat di Kabupaten Bengkalis dengan persentase -1.62%.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Distribusi Penelitian

5.1.1 Variabel Belanja tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi : belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Tabel 5.1 Belanja Tidak Langsung di Provinsi Riau Tahun 2007-2019 (Rp)

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Pertambahan (Rp)	Pertambahan (%)
2007	1.178.464.903.000	-	-
2008	1.544.222.000.000	365.757.097.000	31.03
2009	1.640.706.474.742	96.484.474.742	6.24
2010	1.624.116.000.000	-16.590.474.742	-1.01
2011	2.303.070.714.304	678.954.714.304	41.80
2012	3.492.415.235.667	1.189.344.521.363	51.64
2013	3.292.872.527.400	-199.542.708.267	-5.71
2014	3.431.470.704.719	138.598.177.319	4.20
2015	1.003.206.737.083	-2.428.263.967.636	-70.76
2016	1.756.871.408.729	753.664.671.646	75.12
2017	1.715.731.432.232	-41.139.976.497	-2.34
2018	695.654.836.720	-1.020.076.595.512	-59.45
2019	2.121.156.574.214	1.425.501.737.494	204.91

Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019

Dari Tabel 5.1 di atas dapat kita ketahui Belanja Tidak Langsung Terbesar yaitu Pada Tahun 2012 yaitu sebesar Rp 3.492.415.235.667 atau mengalami

pertambahan sebesar Rp 1.189.344.521.363 atau 51.64% sedangkan Belanja Tidak Langsung Terendah yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 695.654.836.720 atau mengalami pertambahan sebesar Rp -1.020.076.595.512 atau -59.45%.

5.1.2 Variabel Belanja Langsung

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang di pengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur (Halim Abdul 2014 :228).

Belanja daerah dapat pula didefenisikan sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan palaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 5.2 Belanja Langsung di Provinsi Riau Tahun 2007-2019 (Rp)

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Pertambahan (Rp)	Pertambahan (%)
2007	1.416.435.087.413	-	-
2008	2.814.286.000.000	1.397.850.912.587	98.68
2009	2.116.774.369.487	700.339.282.074	49.443
2010	2.500.788.000.000	384.013.630.513	18.141
2011	1.962.058.946.000	-538.729.054.000	-21.54
2012	3.178.350.201.278	1.216.291.237.278	61.990
2013	4.232.409.978.641	1.054.059.777.363	33.16
2014	2.170.603.791.020	-2.061.806.187.621	-48.71
2015	408.349.431.956	-1.762.254.359.064	-81.18
2016	821.253.018.563	412.903.586.607	101.11
2017	623.751.838.487	-197.501.180.070	-24.04
2018	556.443.463.176	-67.308.375.311	10.79
2019	798.227.476.788	241.784.013.612	43.45

Sumber : Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan,2019

Dari Tabel 5.2 diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah total biaya Belanja Langsung di Provinsi Riau yang terbesar pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 4.232.409.978.641 atau mengalami penambahan sebesar Rp 1.054.059.777.363 atau 33.16% sedangkan Belanja Langsung Terendah yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 556.443.463.176 atau mengalami penambahan sebesar Rp - 67.308.375.311 atau 10.79%.

5.1.3 Variabel Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tabel 5.3 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019 (Rp)

Tahun	Pendapatan Daerah(Rp)	Pertambahan (Rp)	Pertambahan(%)
2007	1.257.064.416.520	-	-
2008	1.089.691.000.000	-167.473.416.520	-13,33
2009	1.352.412.744.499	262.821.744.449	24,12
2010	1.330.052.827.000	-22.359.917.449	-1.65
2011	2.210.130.782.734	880.077.955.734	66.16
2012	2.588.688.445.077	378.557.662.343	17,12
2013	2.725.623.913.109	136.935.468.032	5,28
2014	3.245.087.745.090	519.463.831.981	19,05
2015	3.476.960.097.649	231.872.352.559	7,14
2016	3.495.548.893.131	18.588.795.482	0,53
2017	3.753.800.000.000	258.251.106.869	7.388
2018	3.963.964.459.139	210.164.459.139	5,59
2019	3.609.065.922.067	-354.898.537.072	-8,95

Sumber : Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019

Pada Tabel 5.3 Pendapatan Asli Daerah dapat kita ketahui bahwa jumlah total Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar Rp 3.609.065.922.067 Pendapatan Asli Daerah tertinggi pada tahun 2018 Rp 3.963.964.459.139 sedangkan Pendapatan Asli Daerah terkecil pada tahun 2010 Rp 1.330.053.

5.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2007-2019.

Untuk mengetahui hasil dari pengolahan data dengan menggunakan program eviews 9. Dilakukan terhadap (Y) Pendapatan Asli Daerah sebagai variable terikat sedangkan Belanja Tidak Langsung (X1), dan Belanja Langsung (X2) dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh dari dua variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Berikut ini akan dijelaskan tentang pengaruh tersebut secara terinci.

Tabel 5.2.1 : Hasil Pengaruh Belanja daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau tahun 2007-2019

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 07/21/20 Time: 09:41
 Sample: 1 13
 Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.59E+12	5.09E+11	5.091847	0.0005
X1	0.881816	0.317947	2.773469	0.0197
X2	-0.946844	0.247463	-3.826201	0.0033
R-squared	0.595208	Mean dependent var		2.62E+12
Adjusted R-squared	0.514249	S.D. dependent var		1.07E+12
S.E. of regression	7.42E+11	Akaike info criterion		57.70310
Sum squared resid	5.51E+24	Schwarz criterion		57.83347
Log likelihood	-372.0701	Hannan-Quinn criter.		57.67630
F-statistic	7.352014	Durbin-Watson stat		1.643276

Prob(F-statistic) 0.010868

Sumber : Hasil Olahan Eviews 9

Dari hasil diatas maka dapat fungsi persamaan sebagai berikut:

$$\text{Logy} = 0,00000000000259 + \text{Logx}_1 0,881816 - \text{Logx}_2 -0,946844$$

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh dari dua variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat. Dari dua variabel bebas tersebut ada yang berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019. Berikut akan dijelaskan tentang pengaruh tersebut secara terinci.

5.2.1 koefisien Regresi

Berikut ini adalah hasil persamaan belanja tidak langsung (X1), Belanja Lansung (X2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) di Provinsi Riau tahun 2007-2019 dengan analisis regresi sebagai berikut :

1. Konstanta β_0 sebesar 0,00000000000259 artinya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau tahun 2007-2019 jika Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sama dengan 0 adalah 0,0%.
2. Nilai Koefisien β_1 sebesar 0,881816 dan berdasarkan uji T (Uji Parsial) bearti nilai variable Belanja Tidak Langsung (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau(Y) 2007-2019. maksudnya adalah jika terjadi belanja tidak langsung menurun 1% maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 0,881%, dan sebaliknya jika terjadi belanja tidak langsung meningkat 1% maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar 0,881%.
3. Nilai β_2 sebesar -0,946844 dan berdasarakan Uji T (Parsial) bearti nilai variabel Belanja Langsung (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau (Y) 2007-2019.

Maksudnya adalah jika terjadi peningkatan belanja langsung 1% maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar -0,946 % dan sebaliknya jika terjadinya penurunan 1% maka akan menurunkan pendapatan asli daerah sebesar-0,946%

5.2.2 Uji Statistik

1. Uji T (Parsial)

Uji T (Parsial) digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara (parsial) mempunyai pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan satu signifikan dengan α 0,05. Dengan ketentuan sebagai berikut in :

Jika $T \text{ Prob.} < \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak,

Jika $T \text{ Prob.} > \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima.

Berikut ini penjelasan mengenai Uji T (Uji Parsial) :

- a. Pengujian Belanja Tidak Langsung (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)
Berdasarkan hasil dari Uji T (Uji Parsial), diketahui nilai T Prob secara parsial adalah sebesar $0,0197 < \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak. Hal tersebut bearti secara parsial Belanja Tidak Langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhdap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau tahun 2007-2019.
- b. Pengujian Belanja Langsug (X_2) terhadap Pendapatan Asli Provinsi Riau (Y)
Berdasarkan hasil Uji T (Parsial, diketahui nilai T prob secara parsial adalah sebesar $0.0033 < \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial Belanja Langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau tahun 2007-2019.

2. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $F_{\text{prob}} < \alpha$ maka H_0 ditolak

Jika $F_{\text{prob}} > \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima

Dari hasil F uji simultan, diketahui bahwa nilai F_{prob} sebesar $0,01 > \alpha$ 0.05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau tahun 2007-2019.

3. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

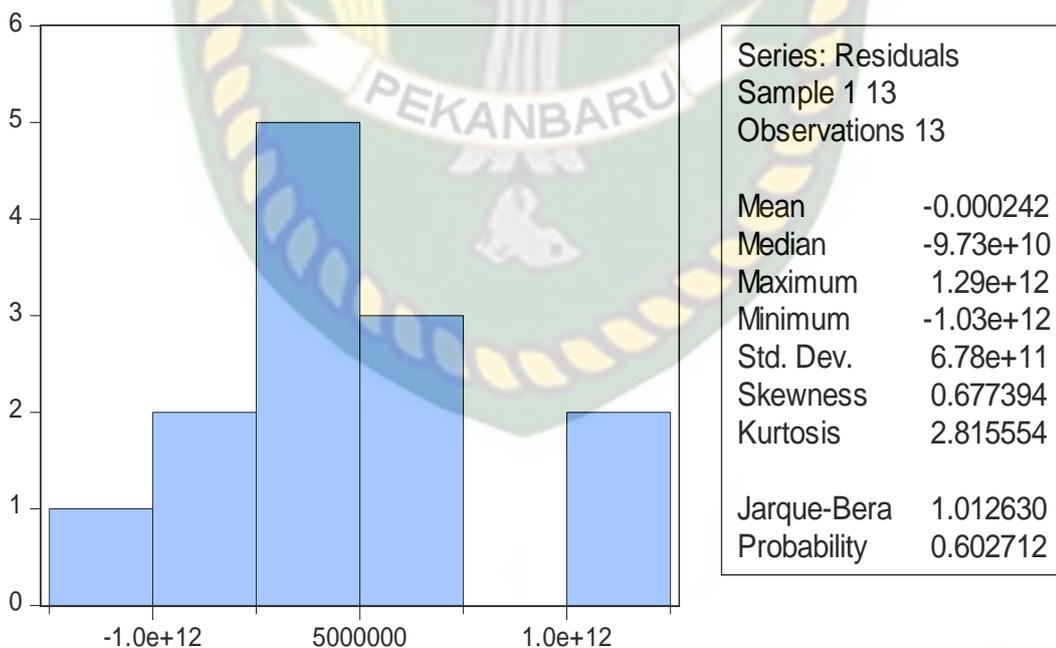
Koefisien determinasi berganda (R^2) berfungsi untuk menyelidiki seberapa besar pengaruh variabel bebas (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) secara bersama-sama terhadap naik turunnya variabel yang tidak bebas (pendapatan asli daerah). Berdasarkan Hasil olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah 0,595208. hal ini menunjukkan bahwa sebesar 59,5208 % variabel-variabel bebas (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel tidak bebas (Pendapatan Asli Daerah) di Provinsi Riau tahun 2007-2019. Sedangkan sisanya 40,4792% dijelaskan oleh variabel di luar model.

5.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengatur apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik adalah data yang bersifat normal. Metode yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi antara lain Jarque-Bera Test (J-B Test). Hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas yaitu H_0 : data distribusi Normal H_a : data tidak terdistribusi normal untuk melihat data terdistribusi normal atau tidak yaitu : jika nilai Jarque-Bera $< X^2$ tabel, Maka H_0 diterima (data tidak terdistribusi normal, dan Jika nilai Jarque-Bera $> X^2$ tabel, maka H_0 ditolak (data terdistribusi normal).

Grafik 5.1 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau Tahun 2007-2019



Sumber : Hasil Olaham Eviews 9

Dari hasil estimasi, terlihat bahwa nilai Jarque-Bera, dimana nilai Jarque-Bera $1.012630 < X^2 18,30704$ maka model data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi di temukan adanya kolerasi antara variabel independent. Model yang baik seharusnya tidak terjadi kolerassi yang tinggi antara variabel bebas. *Tolerance* mengukur varibilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinriaritas yang tinggi. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dengan ketentuan jika nilai $VIF > 10$ maka tidak terkena multikolinieritas.

Tabel 5.2.2 Hasil Uji Multikolieniritas Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2010-2019

Variance Inflation Factors
 Date: 07/21/20 Time: 19:16
 Sample: 1 13
 Included observations: 13

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.59E+23	6.112364	NA
X1	0.101090	11.23565	1.841828
X2	0.061238	6.603188	1.841828

Sumber : Hasil Olahan Eviews 9

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diketahui VIF dari variabel independen yaitu nilai VIF X1 adalah 1.841828 dan nilai X2 adalah 1.841828. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari kedua variaebel tersebut lebih kecil dari 10 maka variabel tersebut tidak terkena multikolinieritas. Hal tersebut bearti antara

Belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak memiliki hubungan linear didalam model regresi tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke satu pengamatan yang lain berbeda. Sedangkan bila terjadi ketidaknyamanan *variance* dari residual pengamatan satu pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homo kedasitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi apakah model refresi tersebut terjadi heteroskdastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai chi square dan nilai kritis chi square dengan ketentuan jika nilai kritis maka terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai chi square lebih besar dari nilai kritis maka terjadi heteroskedasitas dan jika nilai chi square lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedasitas.

Tabel 5.2.3 Hasil Uji Heteroskedasitas Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Riau.

Heteroskedasticity Test: White

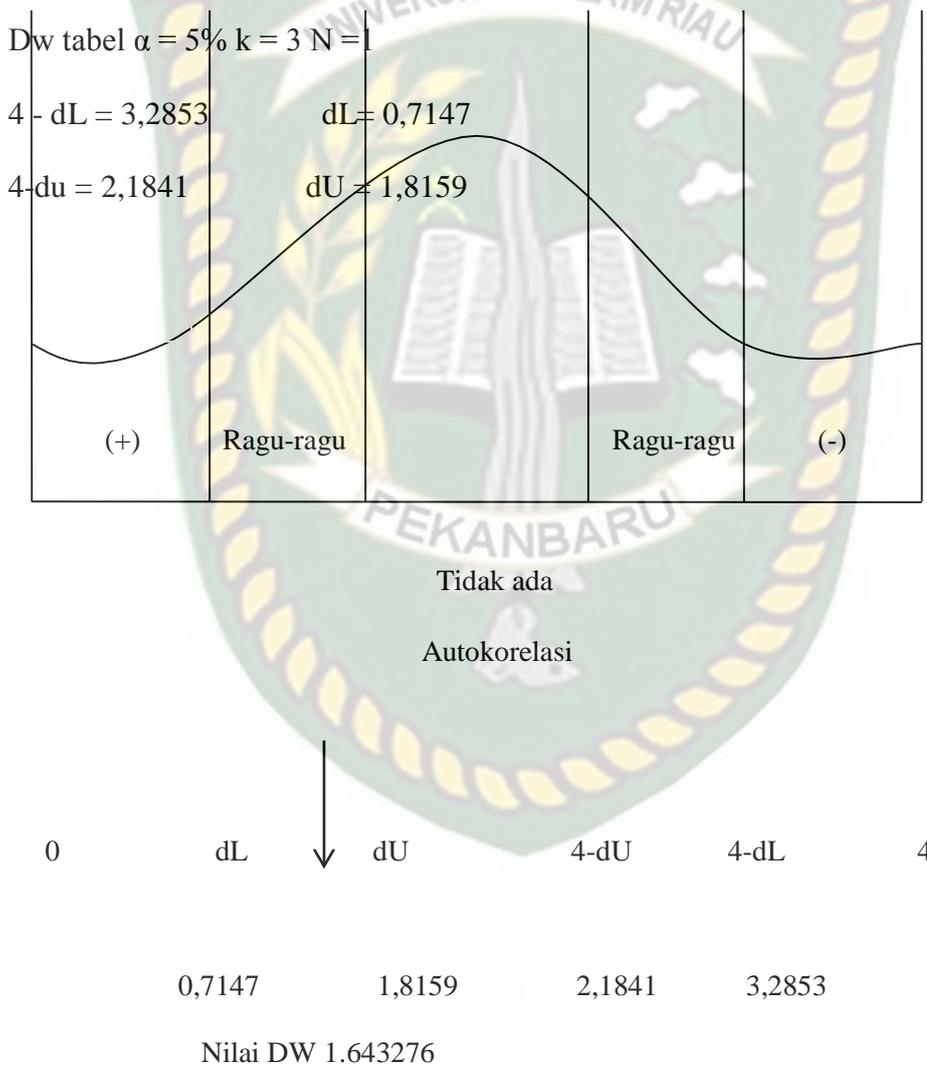
F-statistic	1.945155	Prob. F(5,7)	0.2048
Obs*R-squared	7.559296	Prob. Chi-Square(5)	0.1823
Scaled explained SS	4.060446	Prob. Chi-Square(5)	0.5407

Sumber : Hasil Olahan Eviews 9

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas , di ketahui bahwa nilai *chi square* (Obs* R-Squared) sebesar 0.1823 sedangkan nilai kritis chi-square sebesar 18.30704 dapat dilihat bahwa nilai chi square lebih kecil dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut maka tidak terjadi heteroskedasitas.

4. Uji Autokoralsasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam satu model regresi linier ada kolerasi atau tidak ada kolerasi antara variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya. Model regresi yang baik ialah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Gambar 5.1 : Niali DW Test Pada Uji Derbin Watson

Dari hasil olahan data diatas, dapat di simpulkan bahwa data pengamatan tidak dapat di simpulkan yang pasti (ragu-ragu) karena nilai DW terletak antara (4-dL).

5.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas, maka diketahui bahwa Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019 . dibawah ini akan dijelaskan hasil dari pengujian masing – masing variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau.

5.3.1 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019.

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial variabel Belanja Tidak Langsung diketahui memiliki nilai T prob sebesar $0.0197 < \alpha 0.05$ H_0 ditolak. Maka variabel Belanja Tidak Langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019. Artinya bahwa tinggi dan rendahnya Belanja Daerah memiliki pengaruh rupiah terhadap pendapatan di Provinsi Riau tahun 2007-2019. Kemudian diketahui koefisien Regresi Belanja Daerah sebesar 0,0881816 menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah di Provinsi Riau tahun 2007-2019. Hal ini bearti apabila terjadi kenaikan Belanja Daerah 1%, menyebabkan penurunan Pendapatan asli daerah di Provinsi Riau sebesar 0,088% periode 2007-2019.

Dari Regresi linear berganda yang di peroleh di jelaskan bahwa konstanta sebesar Rp 2,590000 bearti, jika nilai Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung sama denga nol maka besar y adalah sebesar Rp 2,590000 sedangkan koefisien regresi belanja tidak langsung sebesar Rp 0,881816 bearti jika belanja tidak langsung bertambah Rp 1 maka Pendapatan asli daerah akan naik sebesar Rp 0,881816 dan sebaliknya jika Belanja Tidak Langsung berkurang sebesar Rp

1, maka pendapatan asli daerah akan turun sebesar Rp 0.881816. kemudian koefisien regresi Belanja Langsung sebesar Rp -0.946844 berarti jika belanja langsung bertambah Rp 1 maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar Rp -0.946844 dan sebaliknya jika belanja langsung turun Rp 1 maka pendapatan asli daerah akan turun sebesar Rp -0.946844.

Dari hasil uji t (parsial) untuk belanja Tidak Langsung di peroleh nilai probabilitasnya adalah sebesar 0.0197 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0.0197 < 0.05$) maka H_0 ditolak H_a diterima dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Tidak Langsung berpengaruh terhadap naik turunnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. Selanjutnya Nilai probabilitas t-hitung Belanja Langsung adalah sebesar 0.0033 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0.0033 < 0.05$) H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan Belanja Langsung berpengaruh terhadap naik turunnya Pendapatan asli daerah di Provinsi Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007-2019 maka dapat di simpulkan sebagai berikut ini :

1. Pengujian Belanja Tidak Langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil dari Uji T (Uji Parsial), diketahui nilai T Prob secara parsial adalah sebesar $0.0197 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal tersebut bearti secara parsial Belanja Tidak Langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhdap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau tahun 2007-2019.

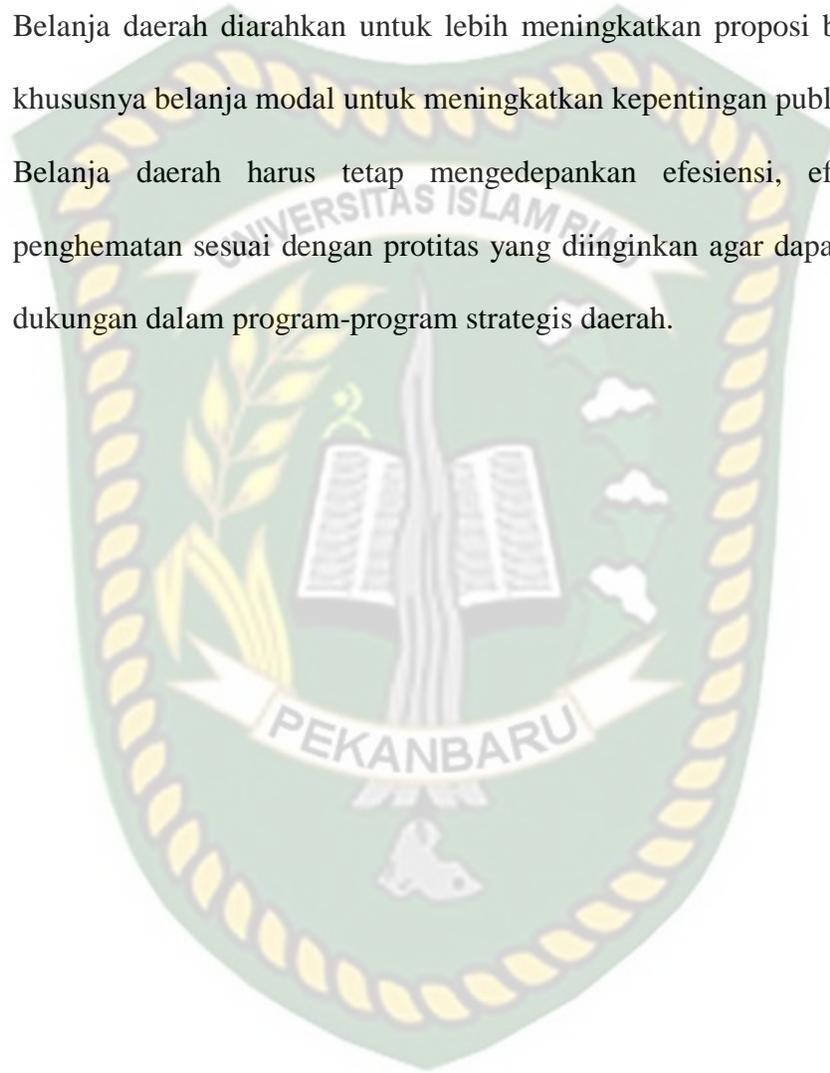
2. Pengujian Belanja Langsung terhadap Pendapatan Asli Provinsi Riau

Berdasarkan hasil Uji T (Parsial, diketahui nilai T prob secara parsial adalah sebesar $0.0033 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal tersebut berarti secara parsial Belanja Langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau tahun 2007-2019.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Riau. Untuk itu Perlu usaha-usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Riau harus lebih baik dan bijaksana menggunakan belanja daerah, baik belanja langsung maupun tidak langsung agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
2. Belanja daerah diarahkan untuk lebih meningkatkan proposi belanja daerah khususnya belanja modal untuk meningkatkan kepentingan public.
3. Belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan protitas yang diinginkan agar dapat memberikan dukungan dalam program-program strategis daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal H, 2002, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Erlangga
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Deliarinov. 2010, *Perkembangan Pemikir Ekonomi*, Jakarta, PT RajaGrafindo persada
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*, Erlangga . Jakarta
- Gujarat Damodar dan Peter Dawn, 2010, *Dasar-dasar Ekonometrika, Salemba Empat*, Jakarta
- Halim. Abdul, 2014, *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat
- Hariadi. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Jhingsan, M.L 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Ahli Bahasa : D.Guritno)*. Jakarta :Rajawali Pers
- Kementrian Keuanga Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019
- Lincolyn, Arsyd. 2007. *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta.
- Lincolyn, Arsyd. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Penerbit BP STIE YKPN. Yogyakarta.
- Lubis. M. Ribai Subhanda, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah Di Kota Padang Sidempuan Tahun 2004-2009*, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Mankiw. N. Gregory, 2002, *Principles Of Economics*, Jakarta, Salemba Empat
- Masayu. Rahmawati. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Kota Bandung*, Skripsi S1 Universitas BSI , Jakarta
- Ni Putu Gina Sukma Antari, *Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Skripsi S1 Universitas Udayana, Bali-Indonesia.

Republik Indonesia. Permendagri No 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

Suparmoko, M. 2003 *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, BPFE

Supranto. J, 2009, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Menteri Dalam Nengri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan*, 15 Oktober 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126. Jakarta

